

ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DALAM
IMPLEMENTASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY TAHUN 2016



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

MUHAMMAD IRWAN ASMIN

NIM : 10500112086

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irwan Asmin
NIM : 10500112086
Tempat/Tgl.Lahir : Wajo, 13 Oktober 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Teluk Bayur Nomor 24
Kota Makassar
Judul : Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam
Implementasi ASEAN Economic Community Tahun 2016

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukri bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 07 Maret 2016

Penyusun,

Muhammad Irwan Asmin
NIM : 10500112086

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Implementasi ASEAN Economic Community Tahun 2016”, yang disusun oleh Muhammad Irwan Asmin, NIM : 10500112086, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan TELAH DAPAT DITERIMA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan),*

Makassar, 31 Maret 2016 M.
1 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Erlina, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melakukan penelitian, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis susun adalah “Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Implementasi ASEAN Economic Community Tahun 2016”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak.

Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, EL Asmin Abbas dan Jemma Seleng yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Jumadi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Dr.Darussalam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Istiqamah, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Rahman Syamsuddin, S.H, M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Ilmu Hukum, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
7. Pimpinan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Pimpinan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar beserta staf dengan senang hati menerima penulis untuk meneliti.
8. Bapak Takbir Salam, S.H dan Bapak Syibli, S.T dengan senang hati menerima penulis untuk meneliti di kantornya.
9. Kedua Adek tercinta Nirwana Asmin dan Selviana Asmin yang tidak henti-hentinya memotivasi, mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum B dan Ilmu Hukum 012 serta semua keluarga ILMU HUKUM yang tidak henti-hentinya memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan penulis khususnya. Semoga Allah swt melindungi dan memberikan berkah-Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 07 Maret 2016
Penulis

Muhammad Irwan Asmin
NIM.10500112086

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-19
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka.....	16
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	20-34
A. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah.....	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
2. Asas Penyelenggaraan Daerah.....	20
3. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	21
B. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	23
1. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	23
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	24
3. Kerangka Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35-38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian.....	35

2. Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	37
3. Studi Dokumen.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
1. Pedoman Wawancara (interview guide).....	37
2. Tape Recorder.....	37
3. Buku Catatan.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39-71
A. Profil Kota Makassar.....	39
1. Aspek Geografi dan Demografi.....	39
2. Luas dan batas wilayah administrasi.....	40
3. Letak dan Kondisi Geografis.....	43
4. Topografi.....	52
5. Geologi.....	52
6. Hidrologi.....	53
7. Klimatologi.....	53
8. Demografi.....	54
9. Aspek Daya Saing Daerah.....	56
10. Rasio tempat ibadah per satuan Penduduk.....	57
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Implementasi ASEAN Economic Community.....	57

C. Produk Hukum Daerah Kota Makassar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menghadapi percepatan Implementasi ASEAN Economic Community.....	64
BAB V PENUTUP.....	72-86
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Penelitian.....	72
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran-Lampiran.....	77
Daftar Riwayat Hidup.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan.¹

¹Busrizalti, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), h. 129.

Sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah dalam hal tersebut daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.² berkaitan dengan hal tersebut Allah swt berfirman dalam QS Al-Anbiyā/21:73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya:

*“Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.”*³

Seperti dikemukakan di atas, ayat ini memiliki arti *“Dan kami jadikan mereka imam-imam yang memimpin dengan perintah kami.”* (pangkal ayat 73). *“dan kami wahyukan kepada mereka itu perbuatan-perbuatan yang baik,”* yang akan ditiru diteladan, dicontoh dan diikuti oleh ummat yang telah mempercayai pimpinan mereka. *“Dan mendirikan sembahyang,”* untuk memperkuat perhubungan dengan Allah dan mempertebal iman. *”Dan mengeluarkan zakat,”* di samping bersembahyang dan menyembah Allah.⁴

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004*, tentang Pemerintahan Daerah.

³Departemen Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2013), h. 285.

⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 74.

Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang kesalehan pribadi mereka, kini ayat 73 menjelaskan upaya mereka menyebarluaskan kesalehan itu kepada lingkungan mereka dengan menyatakan: *Dan kami telah menjadikan mereka yang Kami sebut nama-namanya itu sebagai teladan-teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah kami dan kami telah wahyukan kepada mereka pekerjaan kebajikan sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan sempurna, terutama pelaksanaan shalat dengan baik, sempurna dan bersinambung, penunaian zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan adalah mereka sejak dahulu dan senantiasa hanya kepada kami saja, tidak kepada siapa pun mereka menjadi pengabdian-pengabdian, yakni orang-orang yang mantap dan tulus pengabdiannya.*⁵

Kami jadikan mereka *para imam* yang menyeru manusia kepada kebajikan agama Allah swt dan kepada segala kebaikan dengan seizin kami. Allah swt menyebutkan shalat dan zakat secara khusus di antara seluruh macam ibadah, karena *shalat* merupakan bentuk ibadah yang paling mulia, dan *zakat* merupakan ibadah harta yang paling utama, dan harta merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dari ruh. Pemanduan kedua ibadah ini merupakan pengagungan terhadap maha pencipta dan kasih-sayang terhadap makhluk.⁶

Dari beberapa penjelasan tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri nabi

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran* (Ciputat: Lantera Hati, 2000), h.48.

⁶Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi dan Terjemah* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000), h.21-22.

manusia pilihan Allah swt. Karena secara koleratif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan batin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Dalam aspek bernegara hal tersebut sangatlah dianjurkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Hal ini senada dengan Hadits Nabi Muhammad saw, yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai sosok pemimpin yang ideal.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

Artinya:

*"Abu Nu'aim menceritakan kepada kami berita dari Abu al-Asyhab, al-Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma'qal berkata kepada Ubaidillah Bin Ziyaad, 'Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah saw. aku telah mendengar Nabi saw bersabda, 'Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)."*⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah swt. Untuk memimpin rakyat,

⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdillāh Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min umūri Rasūlillahi Shalla Allah 'alaihi wasallam wasananihi waayyamihi*. juz 9 (t.t: Dar Thuwq al-Najah, 1422), h. 64.

yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana telah di jelaskan di atas dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya, karena ketidak adilannya, misalkan ia tidak akan mampu meloloskan diri dan tuntutan Allah swt, kelak di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super yang bebas berbuat dan memerintah apas aja kepada rakyatnya. Akan tetapi, sebaliknya, ia harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Memimpin adalah amanah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah swt yang kelak akan dipertanggung jawabkan.

Dalam hal ini terkait dengan masalah tersebut AEC yang merupakan sebuah integrasi Ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas atau Free Trade yakni antar negara ASEAN yang telah menyepakati perjanjian ini yang dirancang untuk mewujudkan ASEAN vision di tahun 2020.⁸ Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah istilah yang hadir dalam indonesia (MEA).⁹

Adapun Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations / ASEAN) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Malaysia (ASEAN Founding Fathers).¹⁰

⁸Faisal Basri dan Haris Munandar, *Dasar-dasar Ekonomi Internasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h.16.

⁹Kent E Calder, *Asia's Deadly Trianggle (Segitiga maut Asia)*, terj. Bambang Sayaka (Jakarta: PT Prenhallindo, 1996), h. 3.

¹⁰“Wiki”, *WikipediatheFreeEncyclopedia*.https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN, diakses pada pukul 21.11 WITA 12 Februari 2016.

(Catatan: tidak ada data penerbitan ensiklopedia secara terpisah karena situs ini dimutakhirkan [updated] tiap hari).

Awal mula AEC pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan Ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi (ASEAN Vision 2020). Kemudian dilanjutkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Bali yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa AEC akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi Ekonomi regional di tahun 2020, ASEAN security community dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN. Seluruh pihak diharapkan agar dapat bekerja sama secara kuat didalam membangun komunitas ASEAN di tahun 2020.

Pada pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah diselenggarakan di bulan Agustus 2006 yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia mulai bersepakat untuk bisa memajukan AEC dengan memiliki target yang jelas dan terjadwal dalam pelaksanaannya. Di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang ke-12 di bulan Januari 2007, para pemimpin mulai menegaskan komitmen mereka tentang melakukan percepatan pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015 yang telah diusulkan oleh ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan adanya penandatanganan deklarasi mengenai percepatan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2015 dan untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang bebas barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa dan aliran modal yang lebih bebas lagi.

Didalam mendirikan AEC, mesti melakukan tindakan sesuai dengan pada prinsip-prinsip terbuka, berorientasi untuk mengarah ke luar, terbuka, dan mengarah pada pasar Ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap sistem untuk pelaksanaan dan kepatuhan komitmen ekonomi yang efektif berdasarkan aturan. ASEAN menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif Ekonomi; mempercepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas; memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja memiliki bakat dan terampil; dapat memperkuat kelembagaan mekanisme di ASEAN. Menjadi langkah awal dalam mewujudkan AEC. Disaat yang sama, AEC akan dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja lewat Initiative for ASEAN integration dan inisiatif dari regional yang lainnya.¹¹

Pembentukan basis produksi ASEAN akan mendorong kebutuhan pasar tenaga kerja yang sangat besar. Industrialisasi akan menjadi strategi utama yang semakin memperkuat peran korporasi multinasional. Berbagai kebijakan tenaga kerja Indonesia akan didorong untuk dapat memenuhi kepentingan industri seperti penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan produktifitas industri. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju AEC. Negara ASEAN sepakat mempercepat implementasi

¹¹“Lusi Agustina Sinaga”, *Sejarah singkat pembentukan MEA*. [http://pemahaman mea 2015.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-singkat-pembentukan-mea-2015.html](http://pemahaman%202015.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-singkat-pembentukan-mea-2015.html), diakses pada pukul 23.01 WITA12 Ferbruari 2016.

dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 untuk mewujudkan AEC, dirumuskan Blueprint yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.¹² Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Makassar periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto telah menanggapi AEC dengan PERDA Nomor 05 Tahun 2015 tentang RPJMD selama 5 tahun kedepan.¹³

Adanya kewenangan urusan Pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka Otonomi Daerah, pada satu sisi dapat merupakan berkat, namun pada sisi lain sekaligus merupakan beban yang gilirannya menuntut kesiapan dari daerah untuk melaksanakannya. Artinya Daerah-daerah tidak boleh “bergembira” dengan hadirnya kewenangan baru tersebut. Akan tetapi harus berpikir dan berusaha keras agar urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah dapat dilaksanakan secara baik.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti PERDA kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana RPJMD dalam implementasi AEC tahun 2016.

¹²Michael P. Todaro, *Economic for Developing World an Introduction to Principles Problem and Policies for Development (Ekonomi untuk Negara berkembang)*, terj. Agustinus Subekti, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 6.

¹³“Pemerintah Kota Makassar”, *Profil Kepala Daerah, Official Webset Pemerintah Kota Makassar*. <http://makassarkota.go.id/home>, diakses pada pukul 14.25 WITA 20 Februari 2106.

¹⁴Busrizalti, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, h. 150.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah pada Analisis PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar dalam implementasi AEC tahun 2016, dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “Analisis” ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁵ Adapun menurut para Ahli Wiradi mengatakan “Analisis merupakan sebuah Aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya” sedangkan pendapat dari Komaruddin “Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu” dan menurut Robert J. Schreiter, “Analisa merupakan “membaca” teks, yang melikalisasikan [sic] tanda-tanda yang menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan”.¹⁶

Kata “Peraturan Daerah (PERDA)” Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).

¹⁵Tim Rality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 60.

¹⁶“Aris Kurniawan”, *Pengertian analisis menurut para ahli di dunia*. [http://www.guru-pendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-di dunia](http://www.guru-pendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-di-dunia), diakses pada pukul 10.25 WITA 22 Februari 2016.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak bertentangan terhadap Peraturan Daerah Provinsi.¹⁷

Menurut Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, peraturan Perundang-undangan merupakan Hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.¹⁸ sedangkan menurut pandangan Maria Indrati Soeprapto, peraturan Otonom atau Peraturan Daerah ini pembentukannya dilakukan dengan cara atribusi. Atribusi adalah membentuk peraturan dan pembentukan itu dilakukan dalam rangka “mewakili” pemerintah pusat dalam sistem Negara Kesatuan hal ini berbedanya dengan Delegasi jika Delegasi itu “memberikan” kewenangan, sedangkan Atribusi adalah “mewakili” kewenangan.

¹⁷Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Garfika, [t. th.]), h. 13.

¹⁸Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, h. 25.

Norma Hukum yang posisinya lebih rendah dari Undang-undang formal adalah peraturan Otonom, peraturan Otonom inilah yang di Indonesia dijemakan dalam bentuk Peraturan Daerah.¹⁹

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.²⁰ Sedang di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.²¹

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²²

Kata “RPJMD” adalah singkatan dari Rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk jangka 5 tahun kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (disingkat RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.²³

¹⁹Ismantoro Dwi Yuwono, *Kumpulan PERDA bermasalah dan Kontroversial* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 25-26.

²⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004*, tentang Pemerintahan Daerah.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011*, tentang Peraturan Daerah.

²²Ismantoro Dwi Yuwono, *Kumpulan PERDA bermasalah dan Kontroversia*, hal. 30.

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004*, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Im·ple·men·ta·si /implementasi/ *n* pelaksanaan; penerapan.²⁴ Secara sederhana Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky, mengemukakan Implementasi sebagai evaluasi. "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin Adapun Schubert dalam Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Kata Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan, oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum menurut Fullan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses.

Esensinya Implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman

²⁴Departement Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2008), h. 553.

menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemosntrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokal karya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).²⁵

Kata “ASEAN” adalah sebuah perhimpunan negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok, Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Deklarasi ini dihadiri

²⁵“Irma Angreiny”, *Pengertian inplementasi menurut para ahli*. <http://kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengerian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada pukul 14.38 WITA 22 Februari 2016.

oleh lima negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Wakil-wakil dari ke-5 negara tersebut antara lain Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramos (Filipina).²⁶

ASEAN merupakan sebuah akronim dari *Association of Southeast Asian Nations* adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya. ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar, jika dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada didalamnya sekitar setengah milyar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara didalamnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Kata “Economic” menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau aturan sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Pengertian Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi barang dan jasa, secara umum, dapat dikatakan bahwa Pengertian Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang

²⁶“Zakapedia”, *Pengertian sejarah tujuan ASEAN*. <http://www.pengertian-ahli.com/2013/12/pengertian-sejarah-tujuan-asean.html>, diakses pada pukul 17.30 WITA 14 Februari 2016.

pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia.²⁷

Kata “Commonity” adalah arti dari kata komunitas yang bermakna perkumpulan dalam suatu organisasi tertentu untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut, komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Menurut Crow dan Allan, Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen:

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat” sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Dan saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya.
2. Berdasarkan Minat” Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, hobi maupun berdasarkan kelainan seksual. Komunitas berdasarkan minat memiliki jumlah terbesar karena melingkupi berbagai aspek, contoh komunitas pecinta animasi dapat berpartisipasi diberbagai kegiatan yang berkaitan dengan animasi, seperti menggambar, mengkoleksi action figure maupun film.

²⁷Lincoln Arsad, *Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010), h. 7.

3. Kamus besar bahasa Indonesia ko.mu,ni.tas *n* kelompok organisme (orang dsb) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu; masyarakat.²⁸

Kata “ASEAN Economic Community (AEC)” atau yang lebih masyarakat kenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah program yang telah disepakati oleh Negara-negara ASEAN untuk mencapai AECAN Vision di tahun 2020.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Implementasi AEC di Kota Makassar?
2. Bagaimana PERDA Kota Makassar Nomor 05 tahun 2014 tentang RPJMD dalam menghadapi percepatan Implementasi AEC?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang Peraturan Daerah sebagai berikut:

²⁸Departement Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, h. 722.

²⁹“Seputar Pengertian”, *Pengertian mea dan ciri-ciri masyarakat ekonomi asean*. <http://pengertian.website/pengertian-me-a-dan-ciri-ciri-masyarakat-ekonomi-asean>, diakses pada pukul 15.59 WITA 22 Ferbruari 2016.

Faisal Basri dan Haris Munandar dengan judul Dasar-dasar Ekonomi Internasional, buku ini membahas secara khusus Ekonomi Internasional dimulai dari arti penting Ekonomi Internasional, Neraca Pembayaran, Nilai tukar (Exchange Rate), Perkembangan Teori Perdagangan, Kebijakan Perdagangan, Integrasi Ekonomi dan dampak terhadap Negara/kelompok Negara. Akan tetapi dalam penjelasan atau materi yang dimuat belum ada penjelasan rinci masalah AEC 2016.

Kent E Calder dengan buku yang berjudul Asia's Deadly Triangle (Segitiga maut Asia), terjemahan Bambang Sayaka, dalam buku tersebut membahas mengenai Asia dengan keberhasilan Politik Ekonominya yang mempesona berubah menjadi kawasan militer yang berbahaya dengan implikasi global, Ken E Calder mencari keterkaitan antara pertumbuhan perekonomian dan kekurangan sumber daya energi yang ekstrem akan tetapi dalam buku tersebut belum terlalu dijelaskan AEC, tapi cukup menjelaskan Asia dari sudut sejarah.

Michael P. Todaro, Economic for Developing World an Introduction to Principles Problem and Policies for Development (Ekonomi untuk Negara berkembang), terjemahan Agustinus Subekti, suatu pengantar tentang prinsip-prinsip masalah dan kebijakan pembangunan, buku teks tersebut memberikan tekanan kepada masalah-masalah Ekonomi.

Busrizalti dengan judul buku Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya, Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Implikasinya itulah yang dikaji dalam buku tersebut maupun kemandirian dan kreatifitas Daerah dalam mengelolah daerahnya.

Ismantoro Dwi Yuwono dengan judul buku, Kumpulan PERDA bermasalah dan Kontroversial, buku ini berusaha untuk mengkaji beberapa Peraturan Daerah

sebagai representative dari banyaknya PERDA lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia yang bersifat Kontroversial.

Lincoln Arsad dengan judul buku Ekonomi Daerah, buku tersebut membahas mengenai permasalahan Ekonomi Daerah yang ada di Indonesia dalam buku ini dijelaskan mulai dari unsur pengertian dan macam perencanaan sampai dengan evaluasi proyek.

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao dengan judul buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, dimana dalam buku ini membahas masalah yang meliputi; pembentukan Daerah dan kawasan Khusus, Pembagian urusan Pemerintahan, Kepegawaian Daerah, peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, keuangan Daerah, kawasan perkotaan. namun dalam buku tersebut belum dibahas masalah pemerintah daerah menghadapi AEC.

M. Umer Chapra dalam bukunya Reformasi Ekonomi (Sebuah Solusi Perespektif Islam) yang diterjemahkan oleh Abidin Basri, yang membahas tentang krisis Ekonomi di kawasan Asia, Alternatif bagi Reformasi keuangan Internasional, dan pemicu terjadinya Krisis. Namun buku ini belum dilengkapi dengan implementasi dari kawasan ASEAN yakni AEC.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Implementasi AEC di kota Makassar.
 - b. Untuk mengetahui PERDA Kota Makassar Nomor 05 tahun 2014 Tentang RPJMD dalam menghadapi percepatan Implementasi AEC.

2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang Insya Allah nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya yang berhubungan dengan PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Makassar dalam implementasi AEC.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat maupun pemerintah untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan analisis peraturan daerah kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD dalam implementasi AEC 2016.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah.

Paragraf kesatu mengatur tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 mengemukakan. (1) setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala Daerah. (2) Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Wali Kota. (3) kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala Daerah. (4) Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk Kota disebut wakil Wali Kota. (5) dan ayat (3) dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.¹

2. Asas Penyelenggaraan Daerah

Bagian Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai Asas penyelenggaraan Pemerintahan. Pasal 20 menguraikan, (1) penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: *a) asas kepastian hukum; b) asas tertib penyelenggaraan Negara; c) asas*

¹Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 104.

*kepentingan umum; d) asas keterbukaan; e) asas proporsionalitas; f) asas profesionalitas; g) asas akuntabilitas; h) asas efesiaensi; dan i) asas efektivitas.*²

3. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal menimbang, huruf a, disebutkan, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.”³

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

Dilain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang

²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, h. 81.

³Busrisalti, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013, h. 64.

terjadi di daerah akan semakin kuat. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- c. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem pemerintahan daerah juga

sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Sebab pada umumnya tidak mungkin pemerintah pusat mengurus semua permasalahan negara yang begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disaradi atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJM Daerah juga ditekankan arti pentingnya upaya dalam menerjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan maupun sebaliknya dari hasil pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan

pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.⁴

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah kabupaten / kota wajib memiliki RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RJPPD dan dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- d. Analisa Isu–isu Strategis

⁴“BAPPEDA Banjarmasin Kota”. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. <http://bappeda.Banjarmasingkota.go.id/2011/11/rencana-pembangunan-jangka-menengah.html>, diakses pada pukul 03.10 WITA 02 Maret 2016.

- e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Strategi dan Arah Kebijakan
- g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.⁵

Adapun penjelasan singkat terkait dengan hal tersebut pada poin d, Analisis Isu-isu Strategis e, Visi Misi Tujuan dan Sasaran dan f, Strategi dan Arah Kebijakan.

Analisa Isu–isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan

⁵“BAPPEDA Lombok Barat”, *Pedoman penyusunan RPJMD*. [http://bappeda.lombok_barat.kab.go.id/Pedoman Penyusunan RPJMD](http://bappeda.lombok_barat.kab.go.id/Pedoman_Penyusunan_RPJMD), diakses pada pukul 03.20 WITA 02 Maret 2016.

menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kota Makassar dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan.⁶

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar dalam RPJPD 2005-2025 dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

⁶Pemerintah Kota Makassar, “*Analisa Isu-isu Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar*,” h.132.

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi Kota Makassar dalam RPJMPD 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah:

“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan

sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan pada tahun 2018”.

Pernyataan visi Pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi public yang aksesibel, (5) pengembangan infrastruktur kota yang aksesibel, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman standar dunia”.

(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7)

pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah kota Makassar selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.⁷

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

⁷Pemerintah Kota Makassar, “*Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar*,” h.143-145.

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, restorasi dan reformasi maupun perbaikan kinerja birokrasi terutama di sector pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan di dalam visi dan misi yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.

Perencanaan strategik disamping mengagendakan aktivitas pembangunan, harus pula dapat melingkupi program –program yang mendukung dan menjamin layanan masyarakat dapat dilakukan secara baik dan terarah, yang diantaranya adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang tak pelak lagi merupakan suatu keharusan bagi manajemen Pemerintahan di era abad 21 saat ini.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran, oleh karena itu strategi dalam kerangka perencanaan menengah pembangunan daerah (*Mid-term planning*) merupakan upaya yang cermat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pertimbangan dan analisis terhadap aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang dimiliki oleh Kota Makassar.⁸

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta

⁸Pemerintah Kota Makassar, “*Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar*,” h.150.

kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan, pengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

b. Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

c. Politis

Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

d. Perencanaan Bottom-up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

e. Perencanaan Top Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

3. Kerangka Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan

kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Proses penyusunan RPJMD Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ke 3 alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

a. Alur Proses Strategis

merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

b. Alur proses partisipatif

merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakholder LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

c. Alur Legislasi dan Politis

merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.⁹



⁹“Hari Hambani”. *Penyusunan RPJMD*. http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat_penyusunan_rpjmd.html, diakses pada pukul 04.19 WITA 02 Maret 2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*empiris empirical*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat fakta empiris mengenai hal yang diteliti. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Data sekunder dari bahan-bahan pustaka juga diperlukan untuk membangun teori pada bab yang lebih bersifat teoritis seperti pada bab I dan II.

2. Lokasi Penelitian:

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kantor Balaikota Makassar bagian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jika dianalisa latar belakang dan rumusan masalah serta teori-teori pada bab II maka pendekatan yang sesuai untuk penelitian ini adalah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep-konsep dan bentuk kebijakan pemerintah Kota Makassar

dalam pelaksanaan AEC selain itu, juga menganalisis penerapan PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD dalam implementasi AEC tahun 2016.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan:¹
 - a. Bahan hukum primer, berupa PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.
 - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), h. 392.

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.² Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD dalam Implementasi ASEAN Economic Community tahun 2016.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara pihak Pemerintah Kota Makassar.³
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian sesudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah:

1. Pedoman wawancara (interview guide) yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan, berupa daftar pertanyaan terstruktur.
2. Tape recorder digunakan untuk memperkuat argument dari hasil interview berupa rekaman percakapan dengan informan.
3. Buku catatan digunakan untuk mencatat hasil wawancara (interview) mengenai daftar pertanyaan yang telah dijawab, hal ini sangat mempermudah dalam penyusunan hasil wawancara.

²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 100.

³Husnaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan analisis terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD dalam implementasi AEC tahun 2016, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.⁴



⁴RiantoAdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h.57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kota Makassar

1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.¹

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang

¹Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” (Makassar: Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, 2016), h. 1.

didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.²

2. Luas dan batas wilayah administrasi

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- d. Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

²Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” h. 7.

Tabel 1: Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut
Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2013

Kode Wil	Kecamatan	Luas Area (km2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	3,38
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

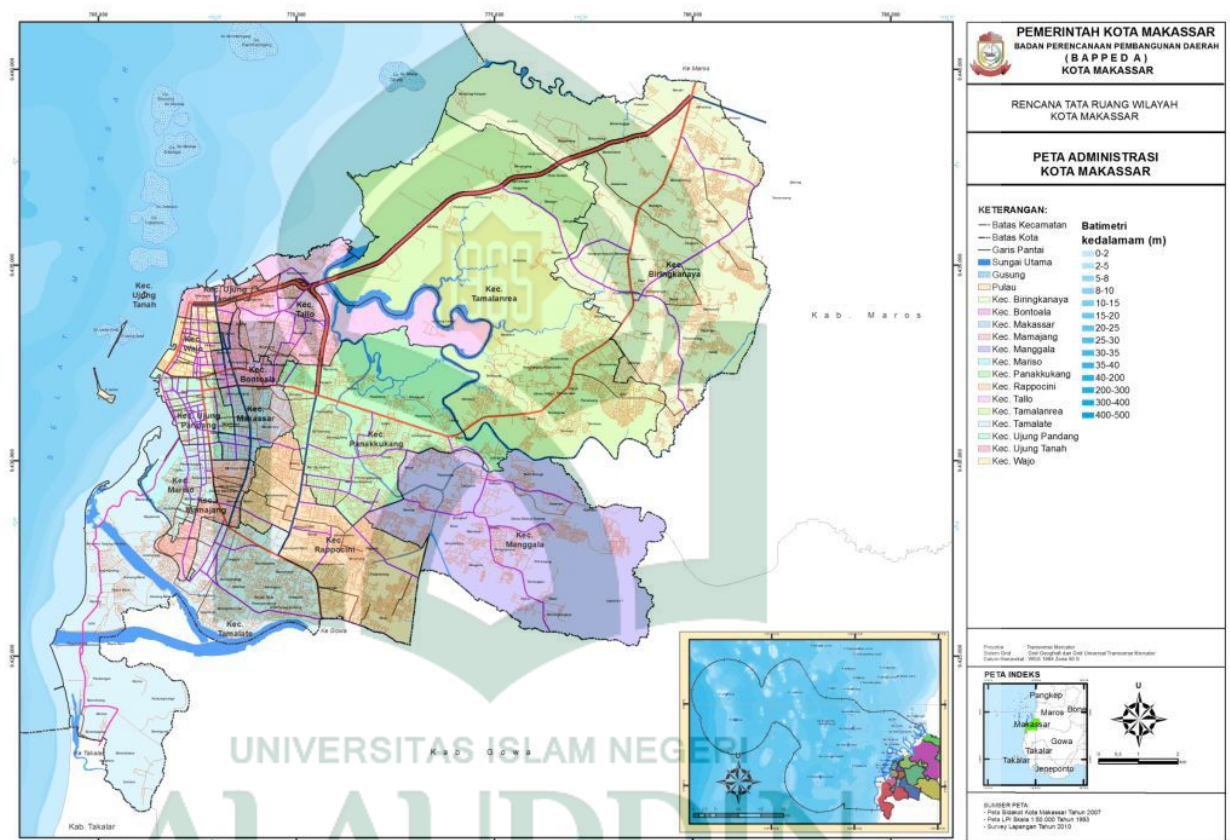
Sumber : RTRW Kota Makassar³

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Secara administratif, 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

³Pemerintah Kota Makassar, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar,” h. 8.

Gambar 1: Peta Administrasi Kota Makassar



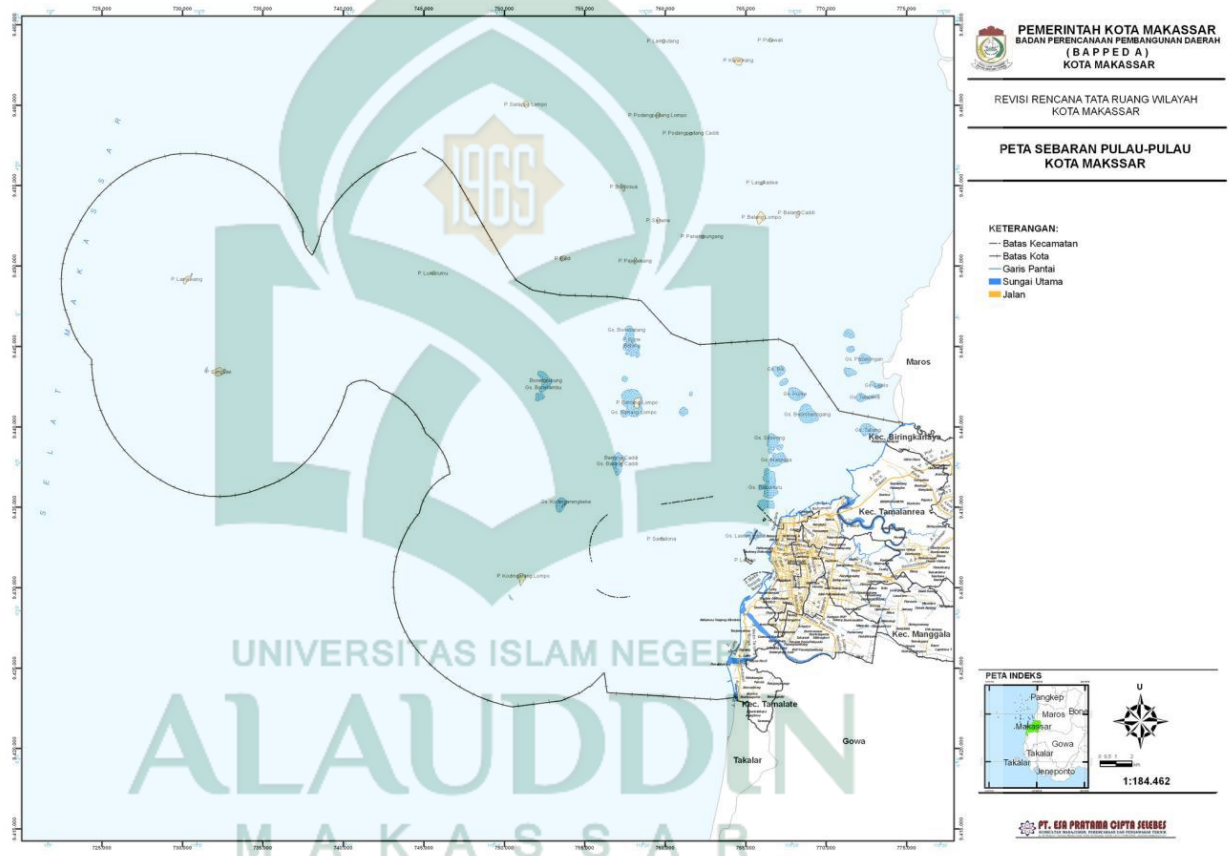
Sumber : Pemerintah Kota Makassar⁴

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (*gusung*)

⁴Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” h. 9.

dan Pulau Kayangan (terdekat). Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2: Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar



Sumber : Pemerintah Kota Makassar⁵

3. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 119° 18' 30,18" sampai dengan 119°32'31,03" BT dan 5°00' 30,18" sampai dengan 5°14' 6,49" LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

⁵Pemerintah Kota Makassar, "Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar," h. 10.

a. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km² atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumberdaya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Berdasarkan data BPS (2013), di subsektor pertanian, luas lahan peruntukannya sebagai lahan sawah yakni 657 lahan dan lahan tegalan 284 ha, Subsektor perikanan darat, luas lahan peruntukan sebagai tambak 479 ha dengan produksi 149,80 ton. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas.

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relative stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

b. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km². Jumlah penduduk 89.143 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di Kawasan

Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan ParangLoe).

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10 ton.

c. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sub sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1.016 ekor.

d. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 152.197 jiwa atau 12,14% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar.

Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.531 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Persentase penggunaan lahan pertanian terhadap luas wilayah kecamatan terdiri atas 27,07% lahan sawah dan 5,70% tegalan/kebun dengan produksi padi sebesar 3936,32 ton dan tegalan/kebun sebesar 83,85 ton. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mallengkeri. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km).

Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, mampu menyumbangkan 2.696 ton di sektor perikanan laut dan armada kapal tangkap berjumlah 248 buah. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat

sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

e. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.

f. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Persentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65% sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen).

g. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar yakni 6.709 ton. Luas wilayahnya

5,94 km² atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 48.382 jiwa serta kepadatan penduduk 8.145 jiwa/km². Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air menjadi andalan di Kecamatan Ujung Tanah dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan.

Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan docking kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

h. Kecamatan Tallo

Berdasarkan data BPS (2013), Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km² atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan yang dimiliki terdiri dari sektor pertanian yakni hanya 25 ha (lahan sawah dan tegalan/kebun) dan sektor perikanan darat (tambak) 293 ha. Total produksi pertanian tahun 2008 sebesar 49,15 ton sedangkan di subsektor perikanan 2.585,90 ton. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai

Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo.

Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri Pengolahan kayu.

Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

i. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km² atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan kepadatan penduduk 26.842 jiwa/km². Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1–5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

j. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km² atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar.

Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 28.637 jiwa (2,28%) dengan kepadatan penduduk berkisar 10.889 jiwa/km². Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya.

Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Pantai Gerbang Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

k. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2,52 km² atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

l. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km² atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-3) yakni 29.433 jiwa/km²

dan jumlah penduduk 61.809 jiwa. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan.

m. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 35.011 jiwa dengan kepadatan 17.593 jiwa/km². Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

n. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82km², dengan tingkat kepadatan sebesar 30.009 jiwa/km². Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsector perikanan laut. Kecamatan mampu menghasilkan 1.227 ton hasil laut atau 3.767.509 rupiah. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran.

Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan

dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.⁶

4. Topografi

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.

5. Geologi

Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Satuan morfologi dataran aluvial pantai; dan
- b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang.

Kedua satuan morfologi diatas dikontrol oleh batuan, struktur, dan formasi geologi yang ada di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang terdapat di kota ini dapat dilihat dari batuan hasil letusan gunung api dan endapan aluvial pantai dan sungai. Struktur batuan ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke

⁶Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” h. 11-13.

wilayah Bulurokeng, Daya, dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan lainnya seperti breksi dan konglomerat yang merupakan batuan berkomponen kasar dari jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu apung, dan gamping.

6. Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai Jene'berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m³/detik di musim kemarau.

7. Klimatologi

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga Februari. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini, serta saluran air yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

Secara umum, konteks pola ruang Kota Makassar mencakup Wilayah Kota Makassar yang memiliki 14 (empat belas) kecamatan dimana didalamnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.⁷

⁷Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” h. 15-20.

8. Demografi

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar *gateway* namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2: Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kecamatan	Populasi Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
	2012	2013	
Mariso	56.989	56.578	0,59
Mamajang	60.172	58.087	- 0,35
Tamalate	174.282	182.939	2,89
Rappocini	154.101	156.665	1,81
Makassar	83.328	81.054	- 0,25
Ujung Pandang	27.440	26.477	- 0,94
Wajo	24.942	27.556	- 1,76
Bontoala	55.278	52.631	- 0,88
Ujung Tanah	47.618	46.836	0,21
Tallo	136.972	138.419	1,10
Panakkukang	144.199	144.997	0,94
Manggala	119.409	130.943	4,24
Biringkanaya	171.084	195.906	5,88
Tamalanrea	105.249	108.984	2,14
Makassar	1.361.063	1.408.072	1,78

Sumber : BPS / Makassar Dalam Angka 2013/INKESRA Kota Makassar 2014⁸

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Tamalate sejumlah 172.506 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,48 sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Ujung Pandang sejumlah 27.160 dengan laju pertumbuhan (0,73).

⁸Pemerintah Kota Makassar, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar,” h. 27.

Tabel 3: Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kota Makassar

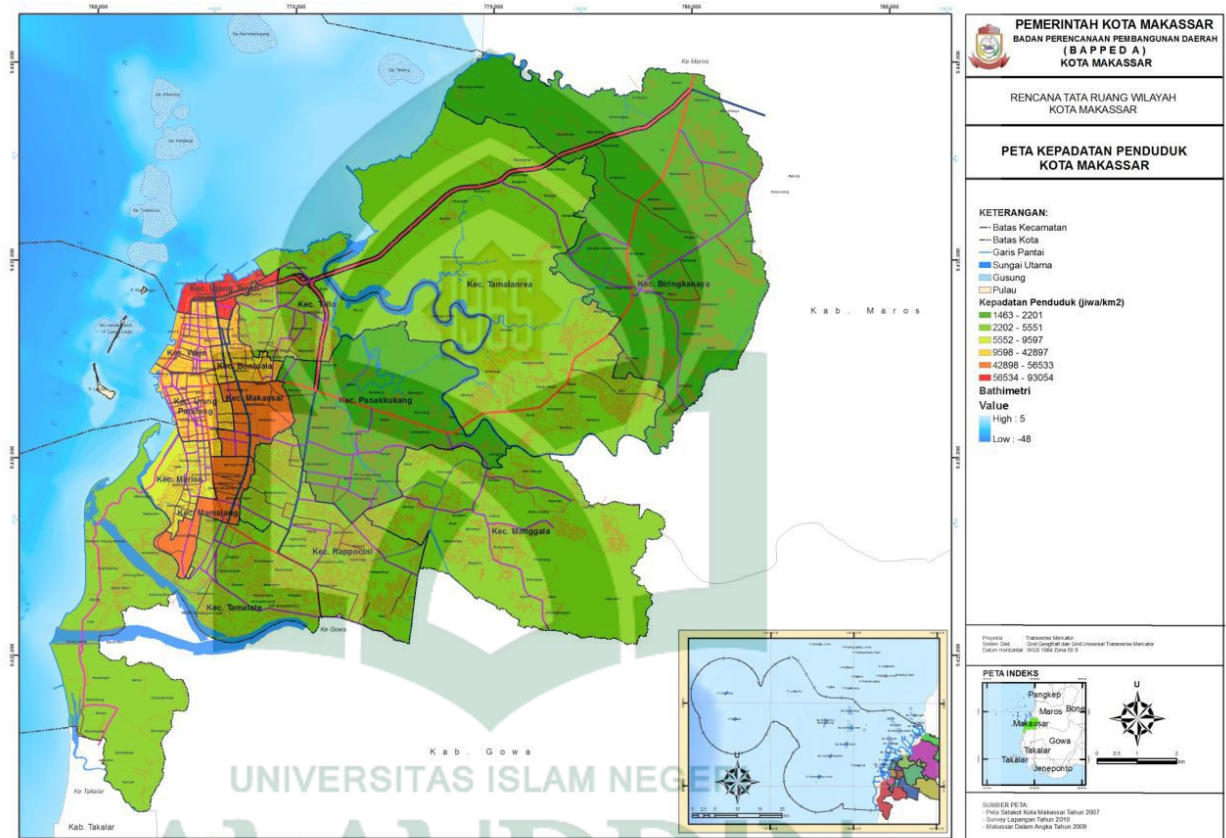
Kode Wil	Kecamatan	Persentase	Kepadatan Penduduk
10	Mariso	4,17	30,993
20	Mamajang	4,40	26,471
30	Tamalate	12,76	8,536
31	Rappocini	11,28	16,526
40	Makassar	6,10	32,730
50	Ujung Pandang	2,01	10,327
60	Wajo	2,19	14,894
70	Bontoala	4,05	26,054
80	Ujung Tanah	3,49	7,935
90	Tallo	10,03	23,254
100	Panakkukang	10,56	8,371
101	Manggala	8,74	4,896
110	Biringkanaya	12,52	3,512
111	Tamalanrea	7,70	3,272
7371	Makassar	100	7,693

Sumber : BPS / Makassar Dalam Angka 2013⁹

Berdasarkan tabel 2.7, persentase penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 12,52% dengan tingkat kepadatan penduduk 3,512 sementara kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Makassar dengan persentase penduduk 6,10%. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil.

⁹Pemerintah Kota Makassar, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar,” h. 28.

Gambar 3: Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar



Sumber : Pemerintah Kota Makassar¹⁰

9. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

¹⁰Pemerintah Kota Makassar, “*Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*,” h. 29.

10. Rasio tempat Ibadah per satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk merupakan penyediaan rumah ibadah bagi pemeluknya. Hal ini untuk menjamin kebebasan beribadah semua pemeluk agama. Rasio rumah ibadah Kota Makassar tahun 2013 adalah 1.262, yang berarti rata-rata 1 rumah ibadah di Makassar untuk melayani 1262 orang. Jumlah rumah ibadah yang terbanyak adalah Masjid dengan jumlah 1.074 unit dengan pemeluk sebanyak 1.330.271 orang. Rasio rumah ibadah di Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4: Rasio Tempat Ibadah Tahun 2013 Kota Makassar

No	Bangunan tempat Ibadah	2013		
		Jumlah (Unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Mesjid	1.074	1.330.271	1238,61
2	Gereja	125	201.873	1614,98
3	Pura	20	6.878	343,9
4	Vihara	15	25.776	1718,4
5	Kelenteng	6	1.423	237,17
	Jumlah	1.240	1.566.221	1263,1

Sumber : Bagian Kesra, Sekretariat Kota Makassar 2013¹¹

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Implementasi ASEAN

Economic Community (AEC)

Pemerintah Kota Makassar telah menggapai hal tersebut sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Walikota Makassar periode 2014-2019, yakni Mewujudkan Kota Makassar sebagai Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong Bangun Kota Dunia. Agar Kota Makassar dapat bersaing dikalangan kota-kota ASEAN guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Makassar, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh

¹¹Pemerintah Kota Makassar, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar,” h. 72.

Bapak Takbir Salam yang menjabat sebagai Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dalam wawancara dengan beliau sebelum masuk pertanyaan inti, mengenai apa kebijakan Pemerintah kota Makassar dalam AEC beliau terlebih dahulu menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dulu dan sekarang sangatlah berbeda, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 01 Tahun 1945 yakni Undang-undang pertama yang mengatur masalah Otonomi Daerah, beliau mengungkapkan bahwa dulu konsep pembangunan Daerah sangatlah dibatasi.

Beliau memberikan penjelasan bahwa dalam rekonstruksi pembangunan selalu mengacu pada apa yang diberikan oleh pusat, bukan dari keperluan Daerah tersebut, dalam hal ini “kita hanya menunggu perintah saja”¹² kata beliau, “Inovasi dan trobosan baru tidak ada dari Daerah”, akan tetapi seiring perkembangan zaman kini pemerintah daerah yang melaporkan apa yang akan dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan Visi dan Misi Kepala daerah yang terpilih lalu akan diproses oleh pusat sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara,

¹²Takbir Salam, (57 tahun), Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Beliau juga menjelaskan bahwa telah banyak perombakan atau pembaharuan Undang-undang tentang Otonomi Daerah, hal ini selalu disempurnakan karena banyaknya keluhan dari masing-masing daerah, keluhan ini muncul karena pemahaman tentang Otonomi Daerah dipahami sepenuhnya dipegang oleh daerah padahal tidak seperti demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai kewenangan Absolute adalah Pemerintah Pusat, beliau juga menambahkan bahwa masing-masing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, tetapi daerah tidak memiliki kedaulatan hal inilah yang membedakan pemerintah pusat dan daerah ditambah dengan tidak semua kewenangan diberikan kepada daerah contohnya dalam bidang Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, Peradilan dan Keamanan.

Ketika otonomi daerah telah disempurnakan Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Makassar selalu membuat terobosan, inovasi dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat kota Makassar, akan tetapi pemerintah daerah tidak bisa seenaknya membuat aturan, contohnya sudah PERDA diseluruh Indonesia dibatalkan dipusat.¹³

Setelah beliau menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan dan tonomi Daerah barulah belia menjelaskan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam implemmentasi AEC , dalam wawancara beliau memaparka bahwa salah satu kebijakan pemerintah terpilih periode 2014-2019 adalah menjadikan kota Makassar sebagai kota Dunia, beliau juga menjelaskan bahwa PERDA yang menunjang

¹³Takbir Salam, (57 tahun), *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

pelaksanaan AEC sementara diproses di DPRD Kota Makassar, yang dimana didalam pembahasan tersebut dirincikan tentang bagaimana batasan-batasan atau kriteria kota dunia karena, kalau berbicara masalah kota dunia semuanya serbah modern padahal itu adalah salah satu ciri kota dunia, hal lain yang harus menunjang adalah masyarakat yang ada harus sejahtera, dan sumber daya manusia (SDM) yang bagus, itulah yang dikehendaki dari walikota sekarang.

Terkait dengan hal tersebut Bapak Takbir Salam memaparkan tentang kekaguman sosok pemimpin Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto walikota kota Makassar periode 2014-2019, yang sosoknya dianggap jenius dan mampu berinteraksi dengan pihak-pihak luar karena menguasai IT dan bahasa Inggris ditambah lagi karena beliau adalah lulusan Arsitek tata rancangan bangunan dan mampu memikirkan rancangan-rancangan kedepan untuk kota Makassar, dan tahun lalu 2015 telah mendatangkan walikota-walikota se ASEAN atau ASEAN Major Forum (AMF) 2015 di kota Makassar, untuk berbagai pembahasan salah satunya masalah investasi yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam Implementasi AEC dan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah kota Makassar karena merupakan kota pertama di Indonesia yang telah meleksanakan acara tesebut dan disambut baik oleh pemerintah pusat.¹⁴

Dan semua telah tercover didalam RPJMD kota Makassar sesuai PERDA kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014, adapun tiga Misi utama walikota Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto yakni:

- a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
- b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunla

¹⁴Takbir Salam, (57 tahun), *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

- c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi

Dan dijabarkan lagi secara terperinci yakni:

1. Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

- a. Menuju bebas pengangguran
- b. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua
- c. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam
- d. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
- e. Sampah kita DIA tukar beras
- f. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
- g. Rumah kota murah untuk rakyat kecil
- h. Hidup hijau dengan kebun kota

2. Kota Nyaman Kelas Dunia

- a. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya
- b. Bentuk badan pengendali pembangunan kota
- c. Bangun Waterfront City selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar
- d. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia
- e. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia
- f. Bangun Birringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya
- g. Bangun taman tematik
- h. Tata total lorong

3. Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi

- a. Menuju PAD Rp 1 triliun
- b. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan
- c. Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun

- d. Pelayanan publik langsung ke rumah
- e. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan
- f. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
- g. Bebas bayar internet di ruang publik kota "Makassar Cyber City"
- h. Bentuk Makassar Incorporated dan Bank of Makassar.¹⁵

Menurut Bapak Takbir Salam, kebijakan Kota Makassar bisa dikatakan sudah universal diluar daripada konteks ASEAN saja, semuanya sudah masuk di PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar, tinggal bagaimana SDM kita baik antara pemerintah kota, masyarakat dan para Investor perusahaan bisa menyikapinya dengan baik, Makassar telah berkembang pesat dari tahun ketahun, kita bisa melihat dengan bayaknya Hotel yang ada lebih dari 100 Hotel, tentu hal ini menggambarkan bahwa Kota Makassar memiliki prospek yang baik kedepan.

Paradigma Kota Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia diubah dengan stegmen living room atau tempat tinggal, mengapa demikian hal ini akan menarik investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Makassar akan berdampak baik bagi perekonomian, membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak dan tentu hal ini akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Makassar.

Potensi daerah sangatlah berpengaruh penting dalam pengembangan suatu daerah, dengan potensi daerah yang baik akan mendapatkan sumber pendapat yang banyak pula, yang salah satunya ialah dengan adanya investor yang ada di Kota Makassar.

Adapun untuk menunjang kesuksesan tersebut walikota Makassar, dari aspek pembinaan peningkatan SDM jajaran Pemerintah Kota Makassar, sosialisasi

¹⁵Takbir Salam, (57 tahun), *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan hal Implementasi ASEAN Economic Community dan itulah yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan dari visi dan misi walikota Makassar, adapun untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Makassar maka tiap pekerja akan diberi sertifikat yang nantinya akan diakui secara global dan mampu bersaing secara universal.

Selain hal tersebut Pemerintah Kota Makassar dalam bidang aturan telah menyiapkan PERDA dalam implementasi AEC yakni pembuatan Peraturan Daerah Kota Dunia yang sementara dibahas di DPRD Kota Makassar, proses pembahasan yang memerlukan waktu yang cukup lama hal ini dikarenakan PERDA tersebut sangat unik karena belum ada di Indonesia, dan yakin jikalau Peraturan Daerah Kota Dunia disahkan, maka Kota Makassar akan banjir Study banding dari kota-kota lain yang ada di Indonesia untuk mendalami aturan tersebut bahkan akan ada yang akan membuat peraturan daerah yang sama dengan yang ada di Kota Makassar, dan menurut bapak Takbir salam PERDA Kota Dunia bukanlah perkara yang gampang tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai, semua kembali pada faktor SDM yang salah satunya adalah kedisiplinan.

Kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia dalam implementasi AEC merupakan hal yang masih perlu dikaji kembali dikarenakan faktor pendukung untuk mewujudkan hal tersebut masih jauh dari kriteria Kota Dunia yakni ditinjau dari SDM dan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah untuk mencapai target tersebut, maupun pemerintah Kota Makassar belum menerapkan aturan khusus yang terkait dengan Implementasi AEC tahun 2016.

C. Bentuk Produk Hukum Daerah Kota Makassar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menghadapi percepatan Implementasi ASEAN Economic Community

Dari hasil wawancara dengan salah satu staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni Bapak Syibli beliau terlebih dahulu menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 54 Tahun 2010 terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam PERDA Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 yang merupakan salah satu produk hukum yang telah disipkan pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi percepatan AEC.

Bapak Syibli mengemukakan bahwa sejak keluarnya PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi peleksanaan rencana pembangunan daerah. Pemerintah Kota Makassar telah mengadopsi yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja dan untuk merealisasikan hal tersebut pemeritah harus memiliki kelengkapan atau fitur-fitur ditubuh pemerintahan daerah sehingga bisa mewujudkan hal tersebut, bukan seperti sebelum adanya PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 yang mana pada saat itu pemerintah daerah hanya menuggu rekapitulasi penggaran dari pemerintah pusat dan setelah adanya PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 paradigma tersebut telah berubah.¹⁶ Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Diakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing

¹⁶Syibli, (39 tahun), Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 02 Maret 2016.

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.¹⁷

Terkait dengan AEC Pemerintah Kota Makassar telah membuat aturan untuk menunjang pelaksanaan AEC, yakni ada 2 kebijakan yang pertama PERDA Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD periode 2014-2019 yang telah masuk ke tahap pelaksanaan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dan tetap berpedoman pada RPJMN untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, dan yang kedua yakni PERDA Kota Dunia yang sementara dalam tahap pembahasan rancangan peraturan tersebut di DPRD Kota Makassar.

Adapun menurut Bapak Syibli, beliau mengatakan bahwa evaluasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni persatu tahun dan untuk melihat keberhasilan program tersebut kita dapat melihat 5 (lima) tahun kemudian atau diakhir periode dari Walikota terpilih saat ini, di bab VI (enam) RPJMD Kota Makassar kita dapat melihat strategi dan arah kebijakan, jelas bahwa ditahun 2016 pemerintah Kota Makassar sudah targetkan bahwa tantangan Eksternal berupa berlakunya AEC atau pasar bebas sudah dimulai.

Dan hal tersebut sudah menjadi bagian dari kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditahun 2016 merupakan tahun awal akselerasi pencapaian daripada RPJMD karena tahun 2015 kemarin pemerintah Kota Makassar masih dalam tahap menyiapkan Kota Makassar untuk berbenah diri dalam artian masih dalam tahap evaluasi dan ditahun 2016 kita sudah siap dengan kebijakan implementasi dari AEC itu sendiri.¹⁸ Itulah hal yang disampaikan oleh Bapak Syibli

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010*.

¹⁸Syibli, (39 tahun), *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

yang merupakan Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dalam hal bagaimana Pemerintah Kota Makassar menghadapi percepatan implementasi dari kebijakan pasar bebas atau AEC.

Menurut bapak Syibli dalam wawancara, Pemerintah Kota Makassar sudah menganggapi akan adanya pemberlakuan AEC yang akan berdampak pada Daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti adanya tema-tema menghadapi perdagangan bebas Free Trade di tahun lalu yakni 2015 dan tahun 2017 merupakan puncak dari tahun akselerasi pencapaian dari program RPJMD Kota Makassar dan akhir tahun 2017 Pemerintah Kota Makassar tinggal mempersiapkan pada tahun 2018 dan 2019 bagaimana mengoreksi target yang belum dicapai dan berusaha meraliasasikan yang belum tercapai.

Adapun isi dari RPJMD Kota Makassar (Visi – Misi, Tujuan dan Sasaran) adalah:

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar dalam RPJPD 2005-2025 dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama

Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi Kota Makassar dalam RPJMPD 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013- 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah:

“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua” Visi Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “Kota Dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi pemerintah Kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir

periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

2. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a. Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

b. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia.

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi public yang aksesibel, (5) pengembangan infrastruktur kota yang aksesibel, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman standar dunia”.

c. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi.

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia bebas korupsi”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah kota Makassar selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah.¹⁹

Adapun Peraturan Daerah Kota Dunia yang merupakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk aturan menurut Bapak Syibli, inilah yang paling menonjol atau khusus dalam hal kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam Implementasi dari AEC sementara dalam tahap penyusunan, dan pemerintah Kota Makassar telah melakukan pengkajian di beberapa kota yang dianggap sebagai barometer kota dunia seperti London Inggris dan New York Amerika, adapun parameter utamanya ada dua yang pertama adalah:

1. Lifeable City/ kelayakan untuk hidup

¹⁹Pemerintah Kota Makassar, “Visi Misi dan Tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar,” h.143-144.

2. Vibrant City / Kota yang dianamis.²⁰

Beberapa pengertian mengenai Kota Dunia dalam Wikipedia World Cities merupakan sebuah kota yang dianggap menjadi titik penting dalam sistem ekonomi global, sedangkan menurut BAPPENAS Kota berkelanjutan dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan komponen utama:

1. Kota layak yang aman dan nyaman
2. Kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
3. Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi

Sedangkan menurut RPJMD Kota Dunia ialah Kota yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia dan menurut pakar dari Singapore Belinda Yuen dan Ooi Giok mengatakan bahwa Kota Dunia adalah Kota yang secara global memiliki konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional. Dan memiliki syarat utama:

1. Terwujudnya Liveable city
2. Terwujudnya Vibrancy.

Menurut Bapak Syibli Insyallah tahun ini sudah akan disahkan PERDA Kota Dunia, tinggal menunggu proses-proses yang ada.²¹ Akan tetapi perlu kita ketahui melihat dari hasil penelitian pemerintah Kota Makassar hanya menitikberatkan pada kesiapan di bidang fasilitas publik tanpa mempertimbangkan aspek pengaturan hukum yang lebih spesifik dalam Implementasi AEC di tahun 2016, tentu hal ini tidak menimbulkan keseimbangan dari faktor-faktor penunjang lainnya.

²⁰Syibli, (39 tahun), *Wawancara*, Makassar, 02 Maret 2016.

²¹Syibli, "*Presentasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar*" (Power Point yang disampaikan pada pertemuan pembahasan tentang rancangan PERDA Kota Dunia oleh pemerintah Kota Makassar), h. 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Makassar menanggapi pelaksanaan AEC dengan mengeluarkan kebijakan daerah berbentuk PERDA, Peraturan Walikota (smart city), Keputusan Walikota (tentang Investasi Asing), Surat edaran walikota (AMF 2015), selain itu pemerintah Kota Makassar mempersiapkan berbagai sarana dan fasilitas guna mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor dalam implementasi AEC.
2. Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Ekonomi, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pengaruh negatif bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan di daerah Kota Makassar.

B. Implikasi Penelitian

Dalam Implementasi AEC di tahun 2016 Pemerintah Kota Makassar harus mengantisipasi Investor yang akan menanamkan modalnya berupa kebijakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, surat edaran walikota, yang menguntungkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan masyarakat lokal. Bukan hanya pada sektor tertentu saja yakni mengacu pada tata ruang Kota Makassar yang termuat dalam PERDA Nomor 05 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Makassar yang disahkan pada tanggal 08 November 2014, perlu diingat bahwa keberhasilan dari dari apa yang telah dimuat di dalam RPJMD tersebut tidak sepenuhnya mudah akan terwujud dalam jangka lima tahu kedepan.

Sementara dari aspek Sumber SDM menurut bapak Takbir Salam Kepala Sub bagian dokumentasi dan informasi bagian hukum sekretariat Kota Makassar dalam wawancara beliau mengungkapkan bahwa masyarakat daerah Kota Makassar belum

sepenuhnya dapat dikatakan mampu bersaing dalam bidang SDM, tentu hal tersebut menjadi halangan bagi pemerintah Kota Makassar dalam implementasi AEC.

Sarana dan prasarana pendidikan yang belum menungjung baik di daerah Kota Makassar hal ini sesuai dengan diagram data Pemerintah Kota Makassar tahun 2015, sementara dari sektor pembangunan untuk mendatangkan Investor dari luar berkembang sangat pesat, tentu hal tersebut tidak sebanding dengan langkah-langkah perbaikan mutu SDM di daerah Kota Makassar. terlebih lagi dengan masa jabatan pemerintahan Daerah hanya lima tahun sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan hanya untuk dua kali periode, dengan melihat visi dan misi dari pemerintahan yang ada saat ini untuk periode 2014-2019 dalam Implementasi AEC tentu akan berbeda dengan pemerintah yang akan mendatang, dan bisa saja visi dari pemerintah Kota Makassar untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia akan tidak terwujud karena hanya tertuang dalam RPJMD dan tidak menutup kemungkinan akan dianggab batal ataupun dihilangkan, karena menurut bapak Takbir Salam untuk mewujudkan visi dari walikota saat ini sangatlah sulit tetapi tidak berarti kita tidak bisa, penulis dalam sebuah mengambil kesimpulan hal ini adalah suatu percobaan untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia.

Pada dasarnya semua pilihan investasi mengandung peluang keuntungan di satu sisi dan potensi kerugian di sisi lain. SDM yang kompetitif dan kreatif sangatlah dibutuhkan dalam implementasi AEC disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mungutamakan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basri, Fisal dan Haris Munandar. *Dasar-dasar Ekonomi Internasional*. Jakarta, 2008.
- Adi Nugroho, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009. E Calder, Kent. *Asia's Deadly Trianggle*. Terj. Bambang Sayaka, *Segitiga maut Asia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.
- P. Todaro, Michael. *Economic for Developing World an Introduction to Principles Problem and Policies for Development*. Terj. Agustinus Subekti, *Ekonomi untuk Negara berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Busrizalti. *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: total media, 2013).
- Tim Rality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Aziz Syamsudin, Van Der Tak. *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Garfika, [t. th.].
- Dwi Yuwono, Ismantoro. *Kumpulan PERDA bermasalah dan Kontroversial*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Arsad, Lincolin. *Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Makara, Mohammad Taufik dan Sarman. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Abu Abdillāh, Muhammad Bin Ismail. Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar min umūri Rasūlillahi Shalla Allah 'alaihi wasallam wasananihi waayyamihi*. juz 9. t.t: Dar Thuwq al-Najah.
- Usman, Husnaini dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet v*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2010.

Pemerintah Kota Makassar. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar*. Makassar: BAPPEDA Kota Makassar, 2016.

Pemerintah Kota Makassar. *Analisa Isu-isu Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar*. Makassar: BAPPEDA Kota Makassar, 2015.

Pemerintah Kota Makassar. *Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar*. Makassar: BAPPEDA Kota Makassar, 2015.

Syibli. *Presentasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar*. (Power Point yang disampaikan pada pertemuan pembahasan tentang rancangan PERDA Kota Dunia oleh pemerintah Kota Makassar, Makassar: BAPPEDA, 2016.

Pemerintah Kota Makassar. *Visi Misi dan Tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kota Makassar*. Makassar: BAPPEDA Kota Makassar, 2016.

Departemen Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2013.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*. Ciputat: Lantera, 2000.

Mustafa, Ahmad. *Tafsir Al-Maragi dan Terjemah*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2000.

Departement Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

B. Peraturan-Peraturan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang perencanaan pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 tahun 2014, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

C. Artikel dalam Ensiklopedia Online

“Wiki”, *Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Wikipedia the Free Encyclopedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/MasyarakatEkonomiASEAN> (12Februari 2016).

“Agustina Sinaga, Lusia”. *Sejarah singkat pembentukan MEA*. <http://pemahamanMEA2015.Blogspot.co.id/2015/01/sejarah-singkatpembentukanmea2015.html> (12 Februari 2016).

“Pemerintah Kota Makassar”. *Profil kepala Daerah, Official Webset Pemerintah Kota Makassar*. <http://makassarkota.go.id/home> (20 Februari 2016).

“Kurniawan, Aris”. *Pengertian analisis menurut para ahli di dunia*. <http://www.guru pendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia> (22Februari 2016).

“Angreiny, Irma”. *Pengertian implementasi menurut para ahli*. <http://kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html> (22 Februari 2016).

“Zakapedia”. *Pengertian sejarah tujuan ASEAN*. <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-sejarah-tujuan-asean.html> (14 Februari 2016).

“Banjarmasin Kota, BAPPEDA”. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. <http://bappeda.Banjarmasingkota.go.id/2011/11/rencana-pembangunanjangka-menengah.html> (12 Februari 2016).

“Lombok, Barat”. *Pedoman penyusunan RPJMD*. [http://bappeda.lombok_barat.kab.go.id/Pedoman Penyusunan RPJMD](http://bappeda.lombok_barat.kab.go.id/Pedoman%20Penyusunan%20RPJMD) (02 Februari 2016).

“Hambani, Hari”. *Penyusunan RPJMD*. <http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat/penyusunanrpjmd.html> (02 Februari 2016).



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 01 Maret 2016

Nomor : 070 / 648-II/BKBP/III/2016
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. 1. KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MAKASSAR

Di –

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1405/S.01.P/P2T/03/2016, Tanggal 26 Februari 2016, - Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **MUHAMMAD IRWAN ASMIN**
NIM/ Jurusan : 10500112086/ Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 63, Makassar
Judul : **"ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM IMPLEMENTASI ASEN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TAHUN 2016"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **01 Maret s/d 01 April 2016**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Ub. KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata
NIP : 196705242006041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Implementasi ASEAN Economic Community Tahun 2016”, yang disusun oleh Muhammad Irwan Asmin, NIM : 10500112086, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan TELAH DAPAT DITERIMA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan),*

Makassar, 31 Maret 2016 M.
22 Jumadil Akhir 1437 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy I	: Erlina, S.H, M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 026 Tahun 2016

**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
5. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Jumadi, SH., MH
- : 2. Abdul Rahman, S.Ag., M.Ag Phd

Sebagai pembimbing mahasiswa :

- Nama : Muhammad Irwan Asmin
- N I M : 10500112086
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2016 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 15 Februari 2016

Dekan,

 **Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag**

NIP.19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM
IMPLEMENTASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TAHUN 2016.

Disusun dan diajukan Oleh :

Muhammad Irwan Asmin
NIM: 10500112086

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi
Pada tanggal : 24 Februari 2016

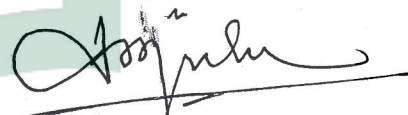
DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Dr. Jumadi, SH., MH
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II



Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, SH. MH
NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

Nomor : SI.1/PP.00.97⁹⁰⁵/2016
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 26 Februari 2016

Kepada

Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**
c.q Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muhammad Irwan Asmin
N I M : 10500112086
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Teluk Bayur No. 24, Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

“ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM IMPLEMENTASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TAHUN 2016”.

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. Jumadi, SH., MH**
2. **Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di kantor Balaikota Makassar terhitung mulai tanggal 01 Maret s/d 09 Maret 2016.

Demikian harapan kami dan terima kasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 1405/S.01.P/P2T/02/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/985/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD IRWAN ASMIN**
Nomor Pokok : 10500112086
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

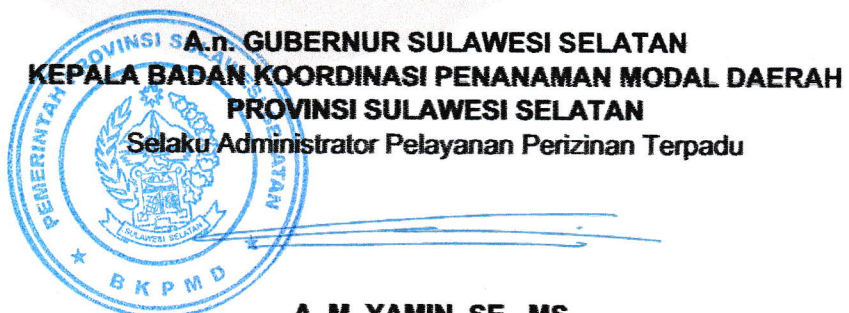
" ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DALAM IMPLEMENTASI ASEN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) TAHUN 2016 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Maret s/d 01 April 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Februari 2016



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar;
2. Peringgal.

Persetujuan Pembimbing

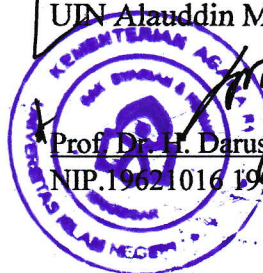
Penulis skripsi saudara Muahammad Irwan Asmin, Nim. 10500112086, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2016". memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di munaqasayahkan.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Samata, 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Awal 1437 H

Munaqisy I	: Erlina, SH., MH	(<u>Acc</u>)
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag	(<u>MS</u>)
Pembimbing I	: Dr. Jumadi, SH., MH	(<u>Jumadi</u>)
Pembimbing II	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D	(<u>Arkanang</u>)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

Disetujui Oleh :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Istiqamah, SH. MH
NIP. 196801120 199503 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudara Muahammad Irwan Asmin, Nim. 10500112086, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2016". memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

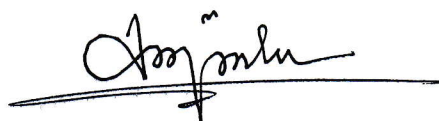
Gowa, 07 Maret 2016

Pembimbing I



Dr. Jumadi, SH., MH
NIP. 19630204 199403 1 003

Pembimbing II



Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Irwan Asmin lahir pada tanggal 13 Oktober 1993 di Dusun Bocco Kelurahan Bocco, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan El Asmin Abbas dan Jemma Seleng. Penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Sambung Jawa 01 Makassar tahun

2006, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 01 Makassar dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 14 Makassar, dan mengikuti berbagai organisasi Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, serta lulus tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R